



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : PRIYANTO HARTO NUGROHO
- Jabatan** : AUDITOR MUDA
- NHK** : 878122

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.991.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.015.000.000		
2. Tanah Seluas 272 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 816.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/309 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 927.000.000		
4. Tanah Seluas 466 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 233.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	84.800.000
1. MOBIL, ISUZU TBR 541/ ST.WAGON Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO AT Tahun 2008, Rp. 5.800.000		
3. MOTOR, HONDA NCK1A2CB A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
4. MOTOR, HONDA L1F02N36LIA/T Tahun 2023, Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.154.800.000



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.154.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.